

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menandakan bahwa masa depan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembangunan di daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Keleluasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selayaknya dapat menjadi momentum untuk melaksanakan pemerintahan dengan lebih baik, bersih, efektif dan efisien dalam mendukung serta menjalankan berbagai program nasional di tingkat daerah melalui kerja nyata. Program nasional tersebut antara lain Nawacita Jokowi-JK, Indonesia Emas 2045, dan berbagai program lainnya. Apabila Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat dengan baik, maka keberhasilan yang gemilang bukan lagi hanya sebatas mimpi. Selain itu, rakyat akan semakin memiliki kepercayaan kepada pemerintah dan merasakan tentang arti pentingnya peran pemerintah dalam penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka akselerasi pembangunan di berbagai bidang, tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama tahun 2008-2015

mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 16,22% (persen) setiap tahunnya. Besarnya kebutuhan belanja yang semakin meningkat tidak memungkinkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Erlina dan Nur, 2017:1978). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (BPS, 2017). Menurut data BPS, PAD yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2015 sebesar Rp 1.911.224.967.000,00. Sedangkan penerimaan dana transfer dari pusat yang bersumber dari DAU dan DBH Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 4.199.245.870.000,00. Data tersebut menunjukkan bahwa PAD Provinsi DIY masih relatif rendah dibandingkan dengan penerimaan dana transfer dari pusat melalui DAU dan DBH Pajak. Lebih besarnya bagian dana transfer daripada PAD menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Sebab, PAD merupakan cerminan dari kemandirian sebuah daerah.

Demi keberlanjutan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada daerah berupa dana transfer sebagai bentuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan diberikannya dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah (Nehen, 2012: 430). Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih lanjut DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DJP, 2017).

DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (DJPK, 2017). Berdasarkan data BPS, secara keseluruhan DBH Pajak yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama tahun 2008-2015 mengalami penurunan rata-rata 3% (persen) setiap tahunnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa daerah tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan yang bersumber dari DBH Pajak. Pemerintah Daerah harus memiliki tekad untuk terus melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan hati yang bersih untuk menjalankan pemerintahan agar aktivitas ekonomi terus tumbuh dengan baik. Aktivitas ekonomi daerah mempunyai kualitas pertumbuhan yang baik apabila pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya tingkat kemiskinan, dan berkurangnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk serta berkurangnya ketimpangan antarwilayah (BPS, 2017).

DAU adalah transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat (BPS, 2017). Menurut data BPS, berbanding terbalik dengan porsi DBH Pajak, DAU yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY selama tahun 2008-2015 menunjukkan tren kenaikan rata-rata 8% (persen) setiap tahunnya. Oleh

karenanya, Pemerintah Daerah harus mampu mengelola dana tersebut dengan baik, tepat sasaran dan utamanya digunakan untuk mendanai sektor-sektor strategis serta kegiatan yang produktif sesuai kebutuhan masyarakat daerah.

Sumber-sumber pendapatan tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan baik melalui pos-pos Belanja Daerah dalam APBD. Pengelolaan APBD yang baik, *prudent*, dan bertanggungjawab, diharapkan mampu menjadi alat yang ampuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2015: 46). Pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) *riil*. Sedangkan untuk tingkat daerah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) *riil* (Rizal dalam Laranga,dkk., 2017:219). Menurut data BPS, selama tahun 2008-2015 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY mengalami kenaikan rata-rata 0,38% (persen) per tahun.

Para peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dan kajian secara mendalam. Namun dari berbagai penelitian tersebut masih memberikan hasil yang variatif. Penelitian mengenai Belanja Daerah yang dilakukan oleh Untung dan Tri (2017), serta Wati dan Catur (2017) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rusmita (2016) membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Untung dan Tri (2017), serta Rasyid (2018) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hapid,dkk (2015), serta Rusmita (2016) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014), Ernayani (2017), serta Mulyati dan Yusriadi (2017) mendapatkan hasil bahwa DBH Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Akan tetapi berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapid, dkk (2015) serta Rasyid (2018) membuktikan bahwa DBH Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Mengenai pertumbuhan ekonomi juga terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Marhamah (2016) serta Saleh (2017) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyasari (2013), Laranga (2017), dan Nisa (2017) membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2017) dan Uhise (2013) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berseberangan didapat oleh Susanto dan Marhamah (2016) bahwa DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Laranga (2017), Widyasari (2013), dan Nisa (2017) memperoleh hasil bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fauzyny

(2013), dan Saleh (2017) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapatnya perbedaan hasil penelitian mengenai Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengujian secara empiris apakah terdapat pengaruh PAD, DAU dan DBH Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dimediasi oleh Belanja Daerah. Penelitian ini memodifikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh Fusanto (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah penelitian terdahulu menggunakan DAU dan PAD sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi serta menggunakan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagai sampelnya. Sedangkan penelitian sekarang, menggunakan PAD, DAU dan DBH Pajak sebagai indikator dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi dan sampel pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
7. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

8. Apakah Belanja Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
9. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan objek penelitian penulis adalah

1. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya LRA pada tahun 2008-2015.
2. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2008-2015.
3. Untuk Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap Belanja Daerah secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap Belanja Daerah secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak), dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kontribusi Empiris

Untuk memberikan bukti empiris dan memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh PAD, DAU dan DBH Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5.2 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan pemerintahan dan otonomi daerah.

1.5.3 Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepastakaan sebagai informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka, dan pengertian serta definisi yang menjadi dasar dalam penulisan, juga mengungkapkan kerangka pemikiran teoretis serta perumusan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dengan menggunakan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta rancangan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan hasil dan pembahasan hasil penelitian tentang deskriptif statistik, variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bagian kelima berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran atas penelitian yang telah dilaksanakan.